

# Model Collaborative Governance Penataan Kawasan Wisata

Bambang Rudiansah<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Langlangbuana; e-mail: [rudiansahb79@gmail.com](mailto:rudiansahb79@gmail.com)

\* Korespondensi: e-mail: [rudiansahb79@gmail.com](mailto:rudiansahb79@gmail.com)

Submitted: 04/09/2024; Revised: 09/09/2024; Accepted: 12/09/2024; Published: 30/09/2024

---

## Abstract

*Collaborative Governance in managing the Anyar Tourism Village in Laksana Village, Ibum District, Bandung Regency is carried out through collaboration between the regional government, local communities and various existing policy stakeholders to manage tourism destinations together, this allows for active participation from the community to take part. decisions, resource management and infrastructure development. This research uses a descriptive qualitative method which aims to find out how to optimize the implementation of collaborative governance by using data sources through interviews, observation and documentation, and using secondary data sources since 2023. The research results obtained in Collaborative Governance in the management of the Laksana Tirta Tourism Village Newly, each actor plays a different role. The Laksana Village Government and private parties who participate in the management of the Laksana Tirta Anyar Tourism Village act as facilitators in supporting the management of the Laksana Tirta Anyar Tourism Village. The Laksana Village Government plays a role by providing legal permits. The Laksana Government also carries out its role as a facilitator by making regulations regarding the utilization of village fund assets through BumDesa as well as being a bridge between the Government and the Private Sector. Then the Laksana Government is also a stakeholder in every program for the development of the Tirta Anyar Tourism Village.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Management, Tourism Village*

## Abstrak

*Collaborative Governancer dalam pengelolaan Desa Wisata Anyar di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan berbagai pemangku kebijakan yang ada untuk mengelola destinasi pariwisata secara bersama-sama, hal ini memungkinkan dilakukannya partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut mengambil keputusan, pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan implementasi *collaborative governancer* dengan menggunakan sumber data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan penggunaan sumber data skunder sejak tahun 2023. Hasil penelitian yang didapatkan dalam adalah *Collaborative Governancer* dalam pengelolaan Desa Wisata Laksana Tirta Anyar setiap aktor memainkan peran yang berbeda-beda. Pemerintah Desa Laksana dan pihak swasta yang berpartisipasi dalam pengelolaan Desa Wisata Laksana Tirta Anyar berperan sebagai fasilitator dalam menunjang pengelolaan Desa Wisata Laksana Tirta Anyar. Pemerintah Desa Laksana berperan dengan menyediakan perizinan legalitas. Pemerintah Laksana juga melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membuat regulasi mengenai pemanfaatan Aset dana desa melalui BumDesa tersebut serta menjadi jembatan Pemerintah ke Swasta Kemudian Pemerintah Laksana juga pemangku kepentingan dalam setiap program untuk pengembangan Desa Wisata Tirta Anyar.*

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Pengelolaan, Desa Wisata*

## 1. Pendahuluan

*Collaborative Governance* dalam pengelola desa wisata melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola destinasi pariwisata secara bersama-sama (Abadi, 2021). Hal ini memungkinkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan infrastruktur, sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Pariwisata merupakan salah satu potensi pengembangan desa wisata. Pariwisata dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian sebagai penggerak masyarakat lokal. Desa yang memiliki potensi wisata dapat merangsang perekonomian lokal melalui hadirnya usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Bahkan menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang dapat dimanfaatkan kembali oleh desa wisata untuk membangun atau mengembangkan potensi wisata bersama masyarakat desa dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pariwisata desa mendapatkan julukan baru serta potensi wisata yaitu desa wisata. Dalam pengelola dan pengelolaan desa wisata terkait beberapa aspek yang diselenggarakan oleh pengelola desa wisata dan dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa, BUMDesa, Anggota BPD dan kelompok masyarakat peduli serta (KOMPEPAR) Kelompok Penggerak Pariwisata yang ikut serta dalam pengelolaan desa wisata (Indrayani, Ida Ayu Dewi, Ni Putu Anik Prabawati, 2024).

Pengelola desa wisata harus mempunyai dasar hukum pengelolaan program desa wisata yang ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah desa, dan Badan Pembina Desa yang bertanggung jawab di bidang pariwisata harus mendapat persetujuan diperoleh dari organisasi lokal Desa wisata. (Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, 2021).

Salah satu program wisata Desa Laksana yang disebut dengan Tirta Anyar Kamojang yang dibangun dan di resmikan pada tahun 2017 didasari peraturan daerah Kabupaten Bandung pada Pasal 14 ayat 1 Tentang penetapan program Desa Wisata melalui kementerian Dinas pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pengelolaan program ini meliputi beberapa landasan terkait yaitu pemerintah Desa Laksana selaku monitoring dimana beberapa aset Desa Laksana termasuk dalam objek wisata Tirta Anyar yang disalurkan melalui Bumdesa serta pembangunan jalan menuju area wisata termasuk bagian dari anggaran Dana Desa Laksana.

Program wisata Tirta Anyar ini termasuk bagian dari PADes yang di kelola oleh Bumdesa dan diawasi oleh BPD untuk hal ini pihak Desa dan Pihak BPD bertujuan dalam koordinasi perizinan sekaligus mengawasi pengembangan potensi wisata dan infrastruktur yang harus melalui pengawasan pemerintah desa hanya saja program Tirta Anyar ini tidak terikat sepenuhnya pada pemerintah desa laksana dikarenakan pihak swasta Tirta Anyar mencukupi anggaran pembangunan program wisata tersebut.

Adanya Wisata Tirta Anyar ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Wisata laksana serta membantu perkembangan UMKM masyarakat yang dimana masyarakat ikut terkait dalam mitra usaha atau berdagang pada area Wisata Tirta Anyar tersebut walaupun tidak semua masyarakat terkait dibagian mitra usaha ini yang disebabkan tidak sesuai syarat dan ketentuan dari pihak swasta Tirta Anyar. Berikut Merupakan hasil capaian program pengelola desa wisata Tirta Anyar.

Tabel 1. Capaian Program

Tahun	Program	Indikator	Capaian	Target	Catatan
2022	Pengembangan informasi Tirta Anyar	“Masyarakat” Kurangnya potensi informasi kepada wisatawan luar kawasan.	Menambahkan pemasaran digital media sosial Serta strategi digital marketing.	95%	Capaian 75% dari hasil yang ditetapkan.
2023.	Pengembangan objek rekreasi Tirta Anyar	“Swasta’ Kurangnya daya tarik serta objek rekreasi yang belum lengkap.	Peningkatan pelayanan serta peningkatan fasilitas wisata air.	90%	Capaian 65% dari hasil yang ditetapkan.
2023	Pengembangan program objek wisata dan rekreasi baru Tirta Anyar	“Swasta” Tertinggal dalam potensi objek kekinian serta objek rekreasi yang belum modern.	Peningkatan alat dan fasilitas rekreasi dan penambahan objek rekreasi secara signifikan.	95%	Capaian 65% dari hasil yang ditetapkan.

Sumber: Pusat Informasi Desa Wisata Tirta Anyar (2024)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa telah banyak upaya yang di lakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, tetapi beberapa indikasi yang menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan sehingga menghambat proses pengembangan wisata tirta anyar di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

Kondisi diatas menjadi hambatan pengelola desa wisata dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar mengenai perkembangan pengelolaan Desa Wisata wisata Tirta Anyar. Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Desa Wisata dan bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan desa tersebut, Intinya pengelola Desa Wisata belum melibatkan *stakeholder* (R.S Astuti Dkk, 2020) atau pihak-pihak terkait sehingga belum

optimalnya program dan belum tercapainya tujuan Desa Wisata Tirta Anyar Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak tahun 2023 yang dilakukan secara *sporadic* di Desa Wisata Tirta Anyar Di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data (Sugiono, 2014) dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri triangulasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Hashimov, 2015). Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu Desa Wisata Tirta Anyar Di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dan waktu penelitian kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan Desember 2023 s/d Mei 2024.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Kondisi Awal

Model *collaborative governance ansell and gash* menitik beratkan kepada pengembangan kondisi awal desa wisata tirta anyar dengan kondisi sumber daya Masyarakat yang di ikut sertakan berperan dalam perkembangan desa wisata tirta anyar dengan kelembagaan yang memposisikan Masyarakat berperan sesuai dengan tugasnya masing masing didalam struktur disen kelembagaan yang di pimpin oleh bapak Imam Gurnita sebagai ketua desa wisata tirta anyar sekaligus pemilik pribadi CV Tirta Anyar

Pada pembentukan wisata tirta anyar tidak ada informasi secara transparansi dan terbuka yang harus dikembangkan serta potensi wisata alam yang membuat masyarakat antusias terhadap alam dan juga membentuk umkm, ketenagakerjaan masyarakat Desa Laksana maka dari itu adanya wisata tirta anyar berdampak positif bagi masyarakat laksana sehingga Desa Laksana menjadi dikenal dengan adanya Desa wisata tirta anyar tersebut.

Dimula dengan adanya wisata ini bertujuan memerdayakan sekaligus mengenalkan masyarakat dengan wisata alam dengan tujuan agar masyarakat terinspirasi melestarikan budidaya alam serta menjaga kelestarian alam yang semakin berkurang dan berpotensi menurun maka dari itu hal ini juga memberdayakan masyarakat secara umum dan terbuka untuk menopang maju wisata ini selain itu juga dinamika itu terjadi karena adanya tujuan mempermudah masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan diterpa sulitnya pekerjaan dengan adanya wisata tirta anyar cukup meminimalisir masyarakat setempat untuk bekerja. Akan tetapi indikator sumber daya dalam kondisi awal dapat dikatakan kurang partisipasi dalam melakukan kolaborasi serta tidak ada kemajuan dalam berfikir mengenai apa itu pengelolaan dan kolaborasi.

### **3.2 Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Hal ini sangat penting karena memberikan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi (Hariadi, 2019). Fokus rancangan sistem ini adalah Aturan main partisipasi kerjasama, terbentuknya forum, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi proses pelaksanaan kerjasama.

Dimensi ini menunjuk pada aturan dasar organisasi yang merupakan legitimasi dalam penyelenggaraan desa wisata tirta anyar dan untuk menjadi dasar dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Desa Wisata Tirta Anyar ini didesain kelembagaannya dalam bentuk kegiatan Bersama melalui pemberdayaan berbasis Masyarakat dan terstruktur dengan kepengurusan sebagai berikut a) Pengurus Desa Wisata: Bapak Iman Gurnita, Kompepar (Kelompok Pengerak Pariwisata): Masyarakat dan staff Desa, Kelompok Tani: Masyarakat Desa Laksana, CV Tirta Anyar: Pengurus/pemilik pribadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibentuknya wisata tirta anyar dengan tujuan memperdayakan masyarakat untuk berkolaborasi bersama dengan tujuan pelestarian wisata alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sangat berpotensi.

Pada dimensi ini dimaknai sebagai pemberi informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pemikiran bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka mengenai gagasan akan dibentuknya wisata tirta anyar. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan desa wisata ini berasal dari potensi wisata serta kekayaan alam yang sangat mendukung serta inisiatif dan ide yang dituangkan bersama dalam proses pembentukan wisata tersebut.

### **3.3 Kepemimpinan**

Ketika berkolaborasi, besar kemungkinan konflik/konflik tingkat tinggi akan muncul atau terdeteksi, sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, seringkali terdapat keinginan kuat untuk terlibat dari para pemangku kepentingan, sehingga diperlukan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan serta dapat dipercaya sebagai mediator ketika bekerja sama. (Utami Tanjung Sari, 2019). Kepemimpinan yang kuat, dihormati dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, sangat penting untuk kolaborasi karena meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya berasal dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

Kepatuhan pada pemimpin informal, dimensi ini menunjukkan pada perlunya figure pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dan mampu menghimpun berbagai aspirasi serta meminimalisir terjadinya konflik kepentingan. Semakin pesatnya proses kolaboratif terhadap desa wisata yang di landasi figure pendiri yang selalu mengembangkan wisata tirta anyar, Kepala Desa juga selalu memperdayakan masyarakat untuk mengenalkan masyarakat konsep desa wisata seiring waktu berjalan pendekatan tersebut mulai dipahami oleh Masyarakat dan didukung sebagai Upaya konservasi alam serta pemberdayaan Masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi mengenai intensitas konflik di desa laksana memang tidak pernah terjadi sehingga dari beberapa informan yang diwawancarai tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dengan adanya wisata tirta anyar menjadi sumber konflik. Pada parameter ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan desa wisata laksana tirta anyar memberikan keuntungan positif bagi warga masyarakat desa dan desa sekitar, sehingga sangatlah wajar apabila semua informan mengharapkan desa wisata tirta anyar lebih maju lagi dan bisa lebih efektif bekerjasama dengan pihak swasta, pemerintah dan masyarakat yang sejalan dengan *collaborative governance*. Serta dapat dimaknai adanya wisata tirta anyar berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintah dimana suatu proses dan penyesuaian masalah dapat diselesaikan tanpa berdampak negative kepada masyarakat.

### 3.4 Proses Kolaborasi

*Collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan” Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi (YP Martomo, 2017).

Membangun kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari proses dialog. Pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan memerlukan komitmen tingkat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa dengan mulai terlihatnya desa wisata tirta anyar yang berkembang dan mampu menarik ide dan gambaran baru, maka dimaknai bahwa kepercayaan tersebut telah tumbuh subur di masyarakat khususnya Desa Laksana.

Upaya kolaborasi kemungkinan besar akan diperkuat ketika terdapat situasi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan. Perlu ditegaskan bahwa kerja sama bukanlah suatu kesepakatan yang terjadi satu kali saja, melainkan suatu proses kegiatan kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Dampak proses kolaborasi tirta anyar ini yang dilakukan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat yang bisa dinikmati dan menjadikan Desa Laksana menjadi dikenal sebagai Desa Wisata yang dikunjungi oleh wisatawan serta menjadikan wisata pertama yang memiliki potensi mandiri secara berkala.

Pada *collaborative governance* yang di terapkan di desa wisata tirta anyar berdampak kepada meningkatnya mutu dan kesadaran Masyarakat sekitar mengenai peran mereka dalam mewujudkan perkembangan desa wisata tirta anyar Masyarakat mulai menerima manfaat secara ekonomi dengan hadirnya parawisata yang berkunjung ke desa wisata tirta anyar serta masyarakat pun semakin siap untuk menyambut para wisatawan yang berkunjung infrastruktur desa wisata semakin berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, model kolaborasi *ansell and gash* (Ansell, 2007) yang dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini secara keseluruhan dimensinya dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata tirta anyar, tetapi dari makna yang bisa ditarik

sebagai novelty penelitian ini adalah pentingnya menambahkan satu dimensi pada model *collaborative governance dari ansel and gash* yaitu Motivasi Bersama sebagai pengembangan teori sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebagai bagian dari kajian tentang Collaborative Governance dalam pengelolaan Desa Wisata Lakhsana Tirta Anyar. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing stakeholder mempunyai peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan Desa Wisata Lakhsana Tirta Anyar. Pemerintah Desa Lakusana dan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Lakhsana Tirta Anyar berperan sebagai perantara untuk membantu pengelolaan Desa Wisata Lakhsana Tirta Anyar. Pemerintah Desa Laksana berperan dengan menyediakan perizinan legalitas. Pemerintah Laksana juga melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membuat regulasi mengenai pemanfaatan Aset dana desa melalui BumDesa tersebut serta menjadi jembatan Pemerintah ke Swasta Kemudian Pemerintah Laksana juga pemangku kepentingan dalam setiap program untuk pengembangan Desa Wisata Tirta Anyar. Pihak swasta berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Anyar melakukan perannya dengan memberikan bantuan berupa pembangunan fisik dan pelatihan-pelatihan serta partisipasi yang bermanfaat untuk pengembangan Desa Wisata Tirta Anyar. Masyarakat Desa Laksana dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Anyar sendiri berperan sebagai Komperpar kelompok penggerak pariwisata yang berpartisipasi dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Anyar. Dalam pengelolaannya, masyarakat yang berperan sebagai pelaku wisata yang bergerak melalui CV Tirta Anyar untuk mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Tirta Anyar.

#### **Daftar Pustaka**

- Abadi, M. J. (2021). Collaborative governance Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2). <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Ansell, C. dan A. G. (2007). *Collaborative Govetnance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. No Title.* Oxford University Press.
- Hariadi, A. (2019). *Collaborative governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba.*
- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Indrayani, Ida Ayu Dewi, Ni Putu Anik Prabawati, and I. P. D. Y. (2024). Collaborative Governance Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar).(2024). *Ethics and*

*Law Journal: Business and Notary*, 2(2).  
<https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/151>

Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, and L. K. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabu-bak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1790/1035>

R.S Astuti Dkk. (2020). *Collaborative Governace dalm Perspektif Adminitrasi Publik*. [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative gov \(revisi\)\\_5 7 20-converted-.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative%20gov%20(revisi)_5%20converted-.pdf)

Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Utami Tanjung Sari. (2019). The Effect Of Ethical Leadership On Voice Behavior: The Role Of Mediators Organizational Identification And Moderating Self-Efficacy For Voice. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(1), 48–66.

YP Martomo. (2017). *Collaborative Governancen*. Yuma Pressindo.